

**PENGARUH PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN
PEMERINTAH DAN KUALITAS APARATUR PEMERINTAH
DAERAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAHAT**



Skripsi Oleh:

SITI FATIMAH

01111003018

AKUNTANSI

*Diajukan sebagai salah satu syarat untuk meraih
gelar sarjana ekonomi*

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS EKONOMI

2016

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF
PENGARUH PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN
PEMERINTAH DAN KUALITAS APARATUR PEMERINTAH
DAERAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAHAT

Disusun oleh :

Nama : Siti Fatimah
Nim : 01111003018
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Akuntansi
Bidang Kajian : Akuntansi Sektor Publik


Disetujui untuk digunakan dalam ujian komprehensif

Tanggal Persetujuan

Dosen Pembimbing

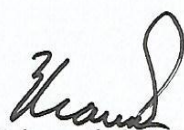
Ketua

Tanggal : 25 Juni 2016


Drs. Burhanuddin, M.Acc., Ak., CA
NIP 195808281988101001

Anggota

Tanggal : 19 Juli 2016


Eka Meirawati, S.E., M.Si., Ak
NIP. 196905251996032001

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

PENGARUH PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN
PEMERINTAH DAN KUALITAS APARATUR PEMERINTAH
DAERAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAHAT

Disusun oleh :

Nama : Siti Fatimah
Nim : 01111003018
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Akuntansi
Bidang Kajian : Akuntansi Sektor Publik

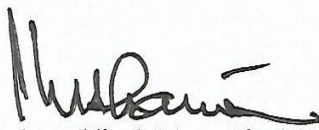
Telah diuji dalam ujian komprehensif pada tanggal 7 Oktober 2016 dan telah memenuhi syarat untuk diterima.

Panitia Ujian Komprehensif
Indralaya, 7 Oktober 2016

Ketua

Anggota

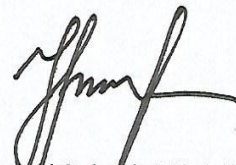
Anggota



Drs. Burhanuddin, M.Acc., Ak., CA
NIP. 195808281988101001



Eka Meirawati, S.E., M.Si., Ak
NIP. 196905251996032001



Ahmad Subeki, S.E., MM, Ak, CA
NIP 196508161995121001

Mengetahui,
Ketua Jurusan Akuntansi



Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak., CA
NIP. 197303171997031002

PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Siti Fatimah
Nim : 01111003018
Jurusan : Akuntansi
Bidang Kajian : Akuntansi Sektor Publik
Fakultas : Ekonomi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi yang berjudul :

**PENGARUH PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN
PEMERINTAH DAN KUALITAS APARATUR PEMERINTAH DAERAH
TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN LAHAT.**

Pembimbing :

Ketua : Drs. Burhanuddin, M. Acc., Ak, CA
Anggota : Eka Meirawati, S.E., M.Si., Ak

Tanggal Ujian : 7 Oktober 2016

adalah benar hasil karya Saya sendiri. Dalam skripsi ini tidak ada kutipan hasil karya orang lain yang tidak disebutkan sumbernya.

Demikianlah pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya, dan apabila Saya tidak benar dikemudian hari, Saya bersedia dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaaan.

Indralaya, 11 Oktober 2016

Pembuat Pernyataan



Siti Fatimah
01111003018

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia Nya sehingga saya dapat menyelesaikan penelitian dan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Dan Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lahat”**. Skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih derajat sarjana Ekonomi program Strata Satu (S-1) Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.

Skripsi ini membahas mengenai bagaimana pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan pemerintah dan kualitas aparatur pemerintah daerah Kabupaten Lahat. Selama penelitian dan penyusunan skripsi ini, penulis tidak luput dari berbagai kendala. Kendala tersebut dapat diatasi berkat bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada :

1. Bapak Drs. Burhanuddin, M.Acc., Ak., CA, Dosen Pembimbing I yang telah mengorbankan waktu, tenaga, pikiran untuk membimbing serta memberikan saran dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibu Eka Meirawati, S.E., M.Si., Ak, Dosen Pembimbing II yang telah mengorbankan waktu, tenaga, pikiran untuk membimbing serta memberikan saran dalam menyelesaikan skripsi ini.

3. Bapak Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak., CA, Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
4. Ibu Umi Kalsum, S.E., M.Si., Ak, Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Mukhtaruddin, S.E, M.Si, Ak, Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan pengarahan selama melaksanakan studi.
6. Para dosen penguji yang telah membantu memberikan kritik dan saran
7. Orang tua penulis, Bapak Tugi dan Ibu Sriyati, kakak dan adik tercinta Suyanto, Wartu, Yati, Wiji Widodo, Muhammad Sunarto, Tito Sepriawan, Dinda Novita Sari, Wahyu Santoso, Rahmat Dhani, Tuti Ruli Yati. Serta keluarga besar yang telah dan selalu memberikan doa, dukungan dan nasihat.
8. Seluruh Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama penulis mengikuti perkuliahan di Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
9. Seluruh Staf Tata Usaha dan karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya Kampus Indralaya.
10. Para pihak di Dinas Kabupaten Lahat telah membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
11. Sahabat Jannah dalam lingkaran, dan sahabat yang senantiasa menyebut dalam doa : Tiara Sonia SE, Gistha Ayu Chintari SE, Sari Pratama Putri SE, Dwi Syahrani SE, Risma Safitri SE serta Ayu Rachmawati SE, Nur Intan Kemuning SE, Wage Harti SE, Septa Andriani S.pd.
12. Teman teman seperjuangan Akuntansi 2011

13. Sahabat Jannah LDF BO Ukhuwah Fakultas Ekonomi, LDK Nadwah Universitas Sriwijaya.
14. Teman teman dan adik pejuang Ikatan Remaja Masjid Ghuzail Al Ajmi Al Barokah, Shella - Yopi – Sarda – Widya – Rika – Fetri - Desi dan Ustadz ustadzah serta santri TK TPA Qalbun Salim – TK TPA Al Khoiriyah.
15. Teman teman di Komunitas Generasi Cendekia (KGC) Ogan Ilir
16. Pejuang Al Quran Komunitas One Day One Juz, Dewan Pengurus Area One Day One Juz Ogan Ilir dan Divisi Tarqiyah Imaniyah One Day One Juz serta semua Odojer yang telah memberikan doa.
17. Adik adik yang senantiasa memberikan semangat, Sri Purnamawati C,SE. Yuniar Fatriyana C.SE, Putri Alqina Faizi SE, Khairunnisa, Indah, Kirana, Mona, Pais, Nurijah, Velly, Nur, Emi, Jenny, Shintya dan semua mutiara Nya.
18. Para Pejuang Jumat Sedekah *Chapter* Indralaya.
19. Ummi Fitri dan Ummi Lisa serta Shalih dan Shalihah di TK Islam Terpadu Adzkia.
20. Dan semua pihak yang telah memberikan doa dan semangat kepada penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Indralaya, 18 Oktober 2016

Siti Fatimah
01111003018

ABSTRAK

PENGARUH PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAN KUALITAS APARATUR PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAHAT

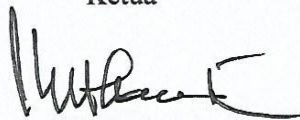
Oleh :
Siti Fatimah

Penelitian ini bertujuan untuk menghitung seberapa besar pengaruh sistem akuntansi keuangan dan kualitas aparatur pemerintah daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di dinas Kabupaten Lahat. Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang bersumber dari jawaban responden dari kuesioner yang disebar.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan pemerintah dan kualitas aparatur pemerintah daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Melalui uji f diketahui sistem akuntansi dan kualitas aparatur pemerintah daerah secara bersama sama berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan dengan nilai sebesar 4,964. Nilai t hitung sebesar 1,830 menunjukkan penerapan sistem akuntansi pada dinas Kabupaten Lahat mempunyai pengaruh positif terhadap laporan keuangan. Nilai t hitung sebesar 2,384 menunjukkan kualitas aparatur pemerintah daerah pada dinas Kabupaten Lahat mempunyai pengaruh positif terhadap laporan keuangan.

Kata Kunci : Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah, Kualitas Aparatur, Kualitas Laporan Keuangan.

Ketua



Drs. Burhanuddin, M.Acc., Ak., CA
NIP. 195808281988101001

Anggota



Eka Meirawati, S.E., M.Si., Ak
NIP. 196905251996032001

Mengetahui,
Ketua Jurusan Akuntansi



Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak., CA
NIP. 197303171997031002

ABSTRACT

THE INFLUENCE OF IMPLEMENTING OF GOVERNMENT'S FINANCIAL ACCOUNTING SYSTEM AND QUALITY OF DISTRICT GOVERNMENT MEMBER INFLUENCE THE QUALITY OF FINANCIAL REPORT OF DISTRICT GOVERNMENT ESPECIALLY IN SUBDISTRICT LAHAT

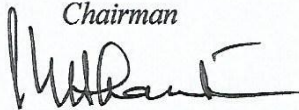
**By :
Siti Fatimah**

This research is held to find out how far finance accounting system and quality of district government members influence the quality of financial report of district government especially in subdistrict Lahat. The method used is quantitative method. Data types which is used in this research is primary data which is collected from the answer of respondents to the questionnaires which are given before.

The result of this research shows that government financial accounting system and the quality of district government members influence the quality of government financial report. By using t test, accounting system and district government members, all together, give a big influence to the quality of government financial report which is shown by 4.964 as the result of f test. The t value is 1.830, this result shown that accounting system implementation in the sub district government Lahat gives a possitive impact the government accounting report. The t value is 2.384 this result shows the quality of the subdistrict Lahat members also give a positive impact to the government financial report. The value of the determinant coefficient is 0,265 which shows that the regression model which has been built is able to explain 26,5% the variability of the quality financial report.

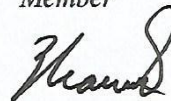
Keywords : financial accounting system, quality of members, the quality of government financial report

Chairman



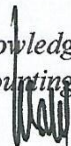
Drs. Burhanuddin, M.Acc.,Ak.,CA
NIP. 195808281988101001

Member



Eka Meirawati, S.E.,M.Si.,Ak.
NIP. 196905251996032001

*Acknowledge by,
Head of Accounting Department*



Arista Hakiki, S.E.,M.Acc.,Ak.,CA
NIP. 197303171997031002

RIWAYAT HIDUP

Nama Mahasiswa : Siti Fatimah
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat/Tanggal Lahir : Wanaraya, 16 Agustus 1992
Agama : Islam
Status : Belum kawin
Alamat Rumah (Orang Tua) : Jl Simpang Saung Naga Sp 1 Wanaraya,
Kelurahan Wanaraya Rt 12 Rw 05.
Kecamatan Kikim Barat, Kabupaten Lahat
Sumatera Selatan.

Pendidikan Formal :

Sekolah Dasar : SD Negeri 06 Kikim Barat
SMP : SMP Negeri 2 Kikim Barat
SMA : SMA Negeri 4 Lahat

Pendidikan Non Formal : Pusat Studi Qur'an, Dakwah dan Bahasa
Arab Ma'had IKADI Yayasan Ash Shaff
Palembang

Pengalaman Organisasi :

- Departemen Pengembangan Sumber
Daya Manusia Badan Otonom
Ukhuwah Fakultas Ekonomi
- Departemen Pengembangan Al Quran
dan Seni Islam Lembaga Dakwah
Kampus Nadwah
- Pembina Rohis SMA N 1 Indralaya
Utara
- Wali kelas Santri TK TPA Qalbun
Salim
- Koordinator muslimah Ikatan Remaja
Masjid Ghuzail Al Ajmi Al Barokah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
SURAT PERNYATAAN ABSTRAK.....	x
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	xi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR GAMBAR	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah	10
1.3. Tujuan Penelitian	10
1.4. Manfaat Penelitian	11
1.5. Sistematika Penulisan	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
2.1. Landasan Teori	13
2.1.1. Teori Keagenan	13
2.1.2. Sistem Akuntansi	14
2.1.2.1. Sistem Akuntansi Pemerintahan.....	15
2.1.2.2. Tujuan Akuntansi Pemerintahan	16
2.1.3. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.....	17
2.1.3.1. Sistem Pencatatan.....	18
2.1.3.2. Prosedur Pencatatan	19

2.1.3.3. Sistem Pengakuan	20
2.14. Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah	22
2.1.5. Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah.....	23
2.1.5.1. Pengertian Kualitas	23
2.1.5.2. Pengertian Aparatur Pemerintah Daerah.....	23
2.1.6. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.....	24
2.1.6.1 Komponen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.....	25
2.1.7. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah	26
2.1.8. Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	28
2.2. Penelitian Terdahulu.....	29
2.3. Kerangka Pemikiran	31
2.4. Hipotesis.....	33
BAB III METODE PENELITIAN.....	35
3.1. Ruang Lingkup Penelitian.....	35
3.2. Rancangan Penelitian	35
3.3. Sumber Data.....	35
3.4. Teknik Penelitian	36
3.5. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel.....	37
3.6. Teknik Analisis Data.....	38
3.6.1. Analisis Kuantitatif	39
3.6.2. Uji Kualitas Data.....	39
3.6.2.1. Uji Realibilitas	39
3.6.2.2. Uji Validitas	39
3.6.3. Uji Asumsi Klasik	40
3.6.3.1. Uji Normalitas	40
3.6.3.2. Uji Heteroskedastisitas.....	41
3.6.3.3. Uji Multikolinearitas	41
3.6.3.4. Uji Autokorelasi	42
3.6.4. Pengujian Hipotesis.....	42
3.6.4.1. Uji Simultan	42

3.6.4.2. Uji Parsial.....	43
3.6.5. Analisis Kualitatif	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	44
4.1. Hasil Penelitian	44
4.1.1. Gambaran Umum Responden	44
4.1.2. Variabel Penelitian	47
4.1.2.1. Gambaran Umum Mengenai Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah	47
4.1.2.2. Gambaran Mengenai Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah	56
4.1.2.3. Gambaran Mengenai Kualitas Laporan Keuangan	63
4.1.3. Analisis Jawaban Responden	69
4.1.4. Uji Kualitas Data.....	74
4.1.4.1. Hasil Pengujian Validitas	74
4.1.4.2. Hasil Pengujian Realibilitas	77
4.1.5. Uji Asumsi Klasik	79
4.1.5.1. Uji Normalitas	79
4.1.5.2. Uji Multikolinearitas	80
4.1.5.3. Uji Autokorelasi	81
4.1.5.4. Uji Heteroskedastisitas.....	82
4.1.6. <i>Goodness of Fit Model</i>	83
4.1.6.1. Koefisien Determinasi.....	84
4.1.6.2. Uji Signifikansi Simultan	85
4.1.6.3. Uji Signifikansi Parameter Individual.....	85
4.1.7. Pengujian Hipotesis.....	86
4.2. Pembahasan.....	88
4.2.1. Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah di Dinas Kabupaten Lahat	88
4.2.2. Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah di Dinas Kabupaten Lahat.....	90

4.2.3. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Dinas Kabupaten Lahat.....	92
4.2.4. Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan di Dinas Kabupaten Lahat	94
4.2.5. Pengaruh Kualitas Aparatur Pemerintah Terhadap Laporan Keuangan di Dinas Kabupaten Lahat.....	96
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	97
5.1. Kesimpulan	97
5.2. Saran.....	98

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1. Kelompok Responden Dinas Kabupaten Lahat Berdasarkan Masa Bekerja	45
Tabel 4.2. Kelompok Responden Anggota Dewan Berdasarkan Masa Bekerja	45
Tabel 4.3. Kelompok Responden Dinas Kabupaten Lahat Berdasarkan Jenis Kelamin	45
4.4. Kelompok Responden Anggota Dewan Berdasarkan Jenis Kelamin	45
Tabel 4.5. Kelompok Responden Dinas Kabupaten Lahat Berdasarkan Jenjang Usia	46
Tabel 4.6. Kelompok Responden Anggota Dewan Berdasarkan Jenjang Usia	46
Tabel 4.7. Gambaran mengenai kesesuaian sistem akuntansi keuangan dengan standar akuntansi pemerintahan	48
Tabel 4.8. Gambaran Mengenai Prosedur Pencatatan Akuntansi Dengan Standar Pencatatan Akuntansi yang berlaku umum	50
Tabel 4.9. Gambaran mengenai pembuatan laporan keuangan yang dilaporkan secara periodik	54
Tabel 4.10. Gambaran mengenai pengetahuan pegawai negeri sipil dalam bidang akuntansi.....	57
Tabel 4.11. Gambaran mengenai pe;atihan penunjang kompetensi pada bidang akuntansi	61
Tabel 4.12. Gambaran mengenai laporan keuangan harus andal, relevan, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.....	64
Tabel 4.13. Rekapitulasi jawaban responden dari daftar pertanyaan variabel sistem akuntansi pemerintahan	71
Tabel 4.13. Rekapitulasi jawaban responden dari daftar pertanyaan variabel kualitas aparatur pemerintah	72

Tabel 4.15. Rekapitulasi jawaban responden dari daftar pertanyaan variabel kualitas laporan keuangan	73
Tabel 4.16. Validitas variabel sistem akuntansi keuangan pemerintah Daerah	75
Tabel 4.17. Validitas variabel kualitas aparatur pemerintah daerah	76
Tabel 4.18. Validitas Variabel kualitas laporan keuangan pemerintah Daerah	77
Tabel 4.19. Reliabilitas variabel sistem akuntansi keuangan pemerintah Daerah	78
Tabel 4.20. Reliabilitas variabel kualitas aparatur pemerintah daerah	78
Tabel 4.21. Reliabilitas variabel kualitas laporan keuangan pemerintah Daerah	78
Tabel 4.22. Uji normalitas model regresi	80
Tabel 4.23. Hasil uji multikolinearitas	81
Tabel 4.24. Hasil uji autokorelasi	82
Tabel 4.25. Hasil uji koefisien determinasi	84
Tabel 4.26. Uji signifikansi simultan	85
Tabel 4.27. Hasil uji statistik	86
Tabel 4.28. Hasil pengujian regresi linear	87

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1. Garis kontinum mengenai kesesuaian sistem akuntansi keuangan dengan standar akuntansi pemerintahan.....	49
Gambar 4.2. Garis kontinum mengenai prosedur pencatatan akuntansi berdasarkan pencatatan akuntansi yang berlaku umum.....	52
Gambar 4.3. Garis kontinum mengenai pembuatan laporan keuangan dan dilaporkan secara periodic.....	56
Gambar 4.4. Garis kontinum mengenai pengetahuan pegawai negeri sipil dalam bidang akuntansi.....	59
Gambar 4.5. Garis kontinum mengenai pelatihan penunjang kompetensi dalam bidang akuntansi.....	63
Gambar 4.6. Garis kontinum mengenai laporan keuangan harus andal, relevan, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.....	68

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Reformasi yang dimulai pada tahun 1998 membawa perubahan yang tidak sedikit di Indonesia pada berbagai bidang. Otonomi daerah merupakan bagian dari agenda reformasi. Reformasi akuntansi keuangan daerah dan manajemen keuangan daerah dilakukan dalam rangka untuk memenuhi tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik atas pengelolaan keuangan daerah (Dewi,2014).

Dalam penelitiannya, Permadi (2009) menyatakan salah satu tujuan utama pelaksanaan otonomi daerah adalah untuk menciptakan pemerintahan yang baik. Kebijakan pemerintah pusat dalam beberapa bidang menjadi kebijakan daerah termasuk kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah.

Peraturan perundangan yang berkenaan dengan otonomi daerah dan berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah antara lain adalah sebagai berikut:

1. Undang Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
2. Undang Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
3. Undang Undang No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Hal di atas diperkuat dengan ditetapkannya peraturan dalam rangka reformasi keuangan negara baik pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, undang undang bidang keuangan negara, yaitu Undang Undang No 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara dan Undang Undang No 1 tahun 2004 Tentang Perbendaharaan

Negara. Peraturan perundang undangan tersebut menyatakan bahwa Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja negara kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berupa laporan keuangan (Fajar,2010).

Laporan keuangan merupakan media bagi sebuah entitas dalam hal ini pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerja keuangannya kepada publik. Pemerintah harus mampu menyajikan laporan keuangan yang mengandung informasi keuangan yang berkualitas (Roviyantie,2011). Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan, catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan, skedul dan informasi tambahan lainnya yang berkaitan dengan laporan tersebut.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyatakan bahwa laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Hal ini ditegaskan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 1 paragraf 9. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Laporan keuangan pemerintah harus menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat

keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik. Hal ini sesuai dengan penjelasan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan, yaitu:

1. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
2. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Dengan demikian laporan keuangan pemerintah harus memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan. Adapun karakteristik kualitatif laporan keuangan meliputi relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Sistem Akuntansi merupakan salah satu hal yang mendasar dan penting dari penerapan

Akuntansi di dalam penyusunan Laporan Keuangan Daerah. Sebagaimana pengertian dari Sistem Akuntansi keuangan Daerah yaitu serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan, dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.

Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun laporan pertanggungjawaban yang menggunakan sistem akuntansi yang diatur oleh pemerintah pusat dalam bentuk Undang-undang dan Peraturan Pemerintah yang bersifat mengikat seluruh Pemerintah Daerah. Dalam Sistem Pemerintah Daerah terdapat 2 subsistem, yaitu Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Laporan Keuangan SKPD merupakan sumber untuk menyusun Laporan Keuangan SKPKD, oleh karena itu setiap SKPD harus menyusun Laporan Keuangan sebaik mungkin.

Sistem Akuntansi Pemerintahan pada pemerintah Pusat diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan No 59/PMK.06/2005 mengenai Sistem Akuntansi dan pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. Maka, ditingkat pemerintah daerah sistem akuntansi pemerintahan diatur oleh Peraturan pemerintah No 50 tahun 2005 mengenai pengelolaan Keuangan Daerah dan juga didukung oleh Peraturan menteri dalam Negeri No 59 tahun 2007 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu pasal 232 yang mengatur tentang sistem akuntansi pemerintah daerah.

Bagi pemerintah daerah menjadi suatu keharusan untuk menyusun laporan keuangan yang berkualitas. Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

mencerminkan tertib pengelolaan keuangan pemerintah daerah, yang mencakup tertib administrasi dan taat asas. Kualitas laporan keuangan akan terlihat dari opini hasil pemeriksaan BPK. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) yang diamanatkan dalam UU Nomor 15 Tahun 2004, menjelaskan bahwa BPK adalah satu-satunya lembaga negara yang bertanggungjawab untuk melakukan pemeriksaan dan pengelolaan keuangan negara.

Selain itu, dalam UU Nomor 15 Tahun 2006, menyatakan bahwa BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan keuangan negara yang dilakukan pemerintah daerah. Auditor (BPK) sebagai pihak ketiga yang independen diperlukan untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja apakah telah bertindak sesuai dengan kepentingan *principal* melalui laporan keuangan.

Setiap tahunnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah mendapat penilaian berupa opini dari Badan pemeriksa Keuangan. BPK dapat memberikan 4 macam opini yaitu, Opini Wajar Tanpa pengecualian (WTP), Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), opini Tidak Wajar (TP), dan pernyataan menolak memberi opini atau tidak memberi pendapat (*Disclaimer*). Opini Wajar Tanpa Pengecualian yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah merupakan indikator bahwa laporan keuangan pemerintah daerah sudah berkualitas. Artinya Laporan Keuangan pemerintah daerah sudah memenuhi syarat atau dapat dikatakan Laporan Keuangan sudah disajikan dan diungkapkan secara relevan, andal, dapat dipercaya dan dapat dibandingkan.

Laporan Keuangan merupakan sebuah produk yang dihasilkan oleh bidang atau disiplin ilmu akuntansi. Oleh karena itu, dibutuhkan Sumber Daya Manusia

berupa tenaga staf keuangan yang kompeten, mampu melaksanakan proses pencatatan akuntansi dan mampu menyusun sesuai format yang berlaku untuk menghasilkan sebuah laporan keuangan yang berkualitas. Begitu juga dengan entitas pemerintahan, untuk menghasilkan laporan keuangan daerah yang berkualitas dibutuhkan Sumber Daya Manusia yang memahami dan kompeten dalam akuntansi pemerintahan, keuangan daerah bahkan organisasional tentang pemerintahan (Roviyantie,2011).

Peraturan pemerintah dan perundang undangan yang telah dikemukakan di atas merupakan bukti untuk perbaikan dalam bidang penyajian laporan keuangan. Akan tetapi, upaya perbaikan di bidang penyajian pelaporan keuangan daerah ini nampaknya belum dapat dilaksanakan sepenuhnya oleh pemerintah daerah. Upaya reformasi penyajian pelaporan keuangan daerah nampaknya belum dapat dilaksanakan sepenuhnya oleh pemerintah daerah maupun di jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Daerah.

Hal ini menunjukkan kinerja pemerintah daerah belum seperti yang diharapkan dengan adanya otonomi daerah. Selain itu, tuntutan untuk memperbaiki kinerja pemerintah daerah khususnya pada kualitas laporan keuangan perlu dilakukan. Adanya fakta bahwa masih buruknya hasil pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah di Sumatera Selatan yang dapat terlihat dengan adanya opini perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan. Perkembangan opini BPK atas LKPD Wilayah Sumatera Selatan. Tahun 2009 dari 16 LKPD ada 10 LKPD yang mendapat opini WDP termasuk objek penelitian penulis yaitu kabupaten Lahat. Selanjutnya untuk tahun 2010 mengalami peningkatan ada 1 LKPD yang mendapat

opini WTP yaitu kota Palembang sedang LKPD lain mendapat opini WDP. Meningkatkan lagi pada tahun 2011, ada 4 LKPD yang mendapat opini WTP yaitu Kota Lubuk Linggau, Kabupaten OKI, Kota Palembang dan Kabupaten Banyuasin.

Hasil audit BPK atas LKPD tahun 2013 di wilayah Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan 8 LKPD atau 50 % dari total LKPD memperoleh opini WDP. Opini atas LKPD tahun 2013 relatif menunjukkan kemajuan dibandingkan dengan tahun 2012 yaitu terdapat 8 LKPD yang memperoleh opini WTP, dibandingkan tahun 2012 hanya 5 LKPD. Opini WTP diperoleh oleh kota Palembang, kota Lubuk Linggau, Kota Prabumulih, Kabupaten OKI, Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Muara Enim, dan Kabupaten OKU Timur, sedangkan kabupaten / kota lainnya memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian. Ini menunjukkan bahwa masih buruknya transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah sehingga hal tersebut berdampak pada buruknya penilaian kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Belum diperolehnya opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan menunjukkan bahwa pelaporan keuangan Pemerintah daerah masih belum sepenuhnya dapat diyakini kewajarannya oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain:

1. Adanya kelemahan sistem pengendalian intern
2. Belum tertatanya barang milik negara/daerah dengan tertib
3. Tidak sesuainya pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dengan ketentuan yang berlaku
4. Penyajian laporan keuangan yang belum sesuai dengan SAP.

5. Kelemahan dalam sistem penyusunan laporan keuangan
6. Kurang memadainya kompetensi SDM pengelola keuangan pada pemerintah daerah.

Berdasarkan fenomena fenomena tersebut, dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah masih belum memenuhi kriteria nilai informasi yang disyaratkan berupa andal yang bebas dari kesalahan dan ditinjau dari kualitas staff pelaksananya. Dalam penelitiannya, Rusmanto (2013) menyatakan karakteristik kualitatif laporan keuangan penting karena akan berpengaruh terhadap penggunaannya dalam pengambilan keputusan.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya yang berjudul Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi kasus pada Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat) yang dilakukan oleh Permadi (2009). Penelitian tersebut mengatakan adanya hubungan dan pengaruh positif antara Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan sebesar 25,6 %. Dengan kata lain masih ada variabel lain yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yaitu sebesar 74,4 %. Dalam penelitian lain yang berjudul Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan hasil penelitian memberikan bukti bahwa kualitas aparatur pemerintah daerah berpengaruh terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Kartika, Daniel dan Yohanes,2013).

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang disebutkan di atas yaitu objek penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Permadi adalah pegawai negeri sipil di Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat, kemudian objek yang menjadi penelitian yang dilakukan oleh Kartika dan Yohanes adalah pegawai negeri sipil Pemerintah kota Tual. Objek penelitian ini adalah pegawai negeri sipil Dinas Kabupaten Lahat. Dan perbedaan dengan penelitian terdahulu yaitu peneliti memberikan penambahan pada variabel independen berupa Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah. Disamping pada penelitian terdahulu menyatakan bahwa kualitas aparatur pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Kartika, Daniel dan Yohanes,2013), alasan lain menambahkan variabel ini adalah tingkat jenjang pendidikan sumber daya manusia yang ada di Dinas Kabupaten Lahat dinilai belum memenuhi standar yang baik, mulai dari banyaknya sumber daya manusia yang hanya lulusan Sekolah Menengah Atas dan minimnya sumber daya manusia yang profesional dibidangnya. Kita ketahui bersama untuk menciptakan laporan keuangan yang baik harus didukung dengan sumber daya manusia yang handal dan profesional dibidang tersebut. Jika hal ini terwujud artinya pemerintahan daerah telah ikut andil dalam mensukseskan agenda salah satu dari reformasi yaitu menciptakan pemerintahan yang baik. Pemberdayaan aparatur pemerintah merupakan faktor penting dalam mewujudkan kualitas laporan keuangan.

Berdasarkan uraian di atas dan didukung dengan fakta fakta yang ada penulis ingin meneliti lebih jauh tentang **“Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi**

Keuangan Pemerintah dan Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lahat”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lahat ?
2. Bagaimana Pengaruh Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lahat ?

1.3 Tujuan Penelitian

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk :

1. Menghitung seberapa besar Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan indikator kesesuaian sistem akuntansi keuangan yang digunakan sudah memenuhi standar akuntansi pemerintahan (SAP), prosedur pencatatan transaksi dilakukan berdasarkan standar pencatatan akuntansi pada umumnya dan laporan keuangan dilaporkan secara periodik.
2. Menghitung seberapa besar Pengaruh Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah dengan indikator pengetahuan pegawai negeri sipil dalam bidang akuntansi dan keaktifan pegawai negeri sipil dalam mengikuti pelatihan penunjang kompetensi bidang akuntansi terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lahat.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi akademisi

Skripsi ini diharapkan mampu menjadi acuan dalam penulisan berikutnya dengan pembahasan yang lebih mendalam mengenai pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah dan kualitas Aparatur Pemerintah Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

2. Secara praktis

a. Pihak Pemerintah

Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan bahan pertimbangan mengenai kualitas laporan keuangan pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

b. Pihak masyarakat

Penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi bagi para masyarakat maupun para *stakeholder* untuk mengetahui tingkat kinerja keuangan pemerintah daerah sehingga dapat digunakan sebagai alat pengawasan mengenai kinerja pemerintah daerah.

c. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi penelitian selanjutnya. Hal ini berkaitan dengan masih terbatasnya penelitian di bidang sektor publik di Indonesia.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari :

Bab I Pendahuluan, menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II Tinjauan Pustaka, menjelaskan tentang landasan teori, penelitian sebelumnya, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian.

Bab III Metode Penelitian, menjelaskan tentang ruang lingkup penelitian, rancangan penelitian, sumber data, responden, definisi operasional dan pengukuran variabel penelitian, dan teknik analisis.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, menjelaskan tentang profil responden, hasil penelitian dan pembahasan variabel yang diteliti.

Bab V Kesimpulan dan Saran, berisi tentang kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewi, Ni Made Rika Krisna. 2014. Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Informasi Laporan
- Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada 10 SKPD Berupa Dinas di Kabupaten Jembrana). *E-journal SI Akuntansi* Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program SI. Vol 2 No. 1
- Juwita, Rukmini. 2013. *Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. jurnal Trikomika*. Vol 12 No. 2
- Kartika, Daniel dan Yohanes Suhardjo. 2013. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal STIE Semarang*. Vol 5 No. 3. Edisi Oktober 2013
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara nomor PER/05/M.PAN/03/2008. *Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah*. Jakarta
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005. *Standar Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta : Pustaka Yudistira
- Peraturan Pemerintahan No. 71 Tahun 2010 tentang *Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP) pengertian dari Kualitas Laporan Keuangan Daerah*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*
- Peraturan Menteri Keuangan (PMK No. 59/PMK/2005) mengenai *Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat*
- Permadi, Dwi Angga. 2009. Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Universitas Widyatama SK*. Ketua Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor : 014/BAN-PT/AK-XII/SI/VI/2009
- Roviyantie, Devi. 2011. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*
- Subaweh, Imam. 2010. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Ekonomi Bisnis* Vol. 13 No. 1

Susanti. 2010. Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bandung. *Jurnal*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung.

Undang - Undang No 32 Tahun 2004 Tentang *Pemerintah Daerah*

Undang - Undang No 33 Tahun 2004 Tentang *Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*

Undang - Undang No 58 Tahun 2005 Tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah*

Undang - Undang No 17 Tahun 2003 Tentang *Keuangan Negara*

Undang - Undang No 1 Tahun 2004 Tentang *Perbendaharaan Negara*

Yuliani, Safrida, et,. 2010. Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Dearah dan Peran Internal Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerinth Daerah. *Jurnal Telaah dan Riset Akuntansi* Vol 3 No. 1